



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT**

**KOMISI VIII DPR RI (BIDANG AGAMA, SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEBENCANAAN**

---

Tahun Sidang	: 2019-2020
Masa Persidangan	: I
Rapat ke	: 25
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat (RDP)
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: <b>Senin, 9 Desember 2019</b>
Waktu	: 09.00 Wib
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI Gedung Nusantara II lantai I Jl. Jenderal Gatot Subroto – Jakarta 10270
Acara	: Membahas Pelaksanaan Program Tahun 2019 dan Kegiatan Anggaran Tahun 2020
Ketua Rapat	: <b>H. Yandri Susanto, S.Pt</b>
Sekretaris Rapat	: Sigit Bawono Prasetyo, S.Sos.,M.Si
Hadir	: 1. 32 dari 53 Anggota Komisi VIII DPR RI; 2. 7 orang Anggota Komisi VIII DPR RI Izin; 3. 9 Rektor PTKIN Wilayah Barat, Tengah dan Timur.

**I. PENDAHULUAN**

1. Ketua Rapat membuka Rapat Komisi VIII DPR RI pada pukul 10.15 Wib dan dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi VIII DPR RI H. Yandri Susanto, S.Pt, Wakil Ketua H.M.Ihsan Yunus, ME.Con.Std, Dr.H.TB Ace Hasan Syadzily, M.Si, Laksdya TNI (Purn) Moekhlas Sidik, MPA dan H. Marwan Dasopang, sesuai waktu dan tempat acara tersebut diatas.

## II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Pada Rapat Dengar Pendapat Komisi VIII dengan Para Rektor Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) Wilayah Indonesia Bagian Barat (Rektor UIN Imam Bonjol Padang-Sumbar, Rektor UIN Sultan Thaha-Jambi, Ketua STAIN Madina-Sumut), PTKIN Wilayah Indonesia Bagian Tengah (Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya-Jatim, Rektor UIN Antasari Banjarmasin-Kalsel, Rektor UIN Sultan M. Hasanuddin Serang-Banten) dan PTKIN Wilayah Indonesia Timur (Rektor IAIN Palu-Sulteng, Rektor IAIN Ambon-Maluku dan Rektor IAIN Palopo-Sulsel) dengan agenda membahas **“Pelaksanaan Program Tahun 2019, Program dan Anggaran Tahun 2020 serta Permasalahan yang Dihadapi”**, disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Komisi VIII DPR RI mendesak para Rektor/Ketua PTKIN baik di Wilayah Bagian Barat, Wilayah Bagian Tengah maupun Wilayah Bagian Timur untuk memastikan pelaksanaan program pembangunan gedung di lingkungan PTKIN tahun anggaran 2019 dan 2020 selesai tepat waktu dan tidak mangkrak.
2. Komisi VIII DPR RI mendukung program percepatan pembangunan sarana dan prasarana di PTKIN seluruh Indonesia selama sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Komisi VIII DPR RI belum menyetujui program dan anggaran tahun jamak (tahun 2021 dan 2022) pembangunan pengembangan 6 PTKIN/Six in One (UIN Imam Bonjol Padang-Sumbar, UIN Sultan Thaha-Jambi, UIN Raden Intan Lampung, UIN Sunan Ampel Surabaya-Jatim, UIN Antasari Banjarmasin-Kalsel, dan UIN Sultan M. Hasanuddin Serang-Banten) karena Kementerian Agama RI belum membahas bersama Komisi VIII DPR RI.
4. Komisi VIII DPR RI akan merekomendasikan kepada Kementerian Agama RI agar dalam hal perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan PTKIN memperhatikan pemerataan antar wilayah, di antaranya PTKIN yang terdampak bencana alam seperti IAIN Palu, IAIN Ambon dan lain-lain.
5. Komisi VIII DPR RI meminta para Rektor PTKIN baik di Wilayah Bagian Barat, Wilayah Bagian Tengah dan Wilayah Bagian Timur agar dalam pelaksanaan program dan anggaran tahun 2019 dan 2020 menindaklanjuti pandangan pimpinan dan anggota Komisi VIII DPR RI, antara lain, sebagai berikut:
  - a. Meningkatkan komunikasi dengan Anggota Komisi VIII DPR RI yang daerah pemilihannya berada di wilayah PTKIN dimaksud.
  - b. Mengelola program yang anggarannya bersumber dari SBSN secara profesional, transparan dan akuntabel untuk menghindari terjadinya penyimpangan.

- c. Menyampaikan data kepada Komisi VIII DPR RI mengenai pelaksanaan program pembangunan sarana dan prasarana di masing-masing PTKIN secara transparan sebagai bahan pengawasan.

### III. PENUTUP

Rapat ditutup pada Pukul 14.47 WIB.

**PIMPINAN KOMISI VIII DPR RI  
KETUA,**



**H. YANDRI SUSANTO, S.Pt.**